

Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan agribisnis wilayah kepulauan di kota Ambon, Provinsi Maluku

Rukiaty Usman¹, Sofjan Alizar Sam²

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate, INDONESIA^{1,2}

¹Email: kiaagb@yahoo.co.id

²Email: sofjanalizarsam18@gmail.com

Abstract - Island agribusiness development faces structural challenges such as limited accessibility, territorial fragmentation, and weak cross-sector policy coordination. Ambon City, as the capital of Maluku Province, possesses significant potential for island-based agribusiness rooted in agriculture, fisheries, and micro-enterprises; however, this potential has not been optimally utilized. This study aims to analyse the implementation of collaborative governance in island agribusiness development in Ambon City, Maluku Province. This research adopts a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with local government agencies, agribusiness actors, MSME managers, and community leaders, as well as document analysis of regional policy instruments, including the Ambon City Medium-Term Development Plan (RPJMD), the Maluku Provincial RPJMD, and strategic plans of relevant government agencies. Data analysis focuses on collaboration actors, institutional relationships, and collaborative governance mechanisms. The findings reveal that collaboration among local government, agribusiness actors, and coastal communities has not been strongly institutionalized and remains largely sectoral. An analysis of RPJMD indicators indicates a gap between policy directions and implementation practices, particularly in cross-agency coordination, MSME empowerment, and value-added development of agribusiness products. This study recommends strengthening collaborative governance mechanisms through integrated cross-sector policies, institutionalized government-MSME partnerships, and active community involvement in planning and implementing island agribusiness development.

Keywords: collaborative governance, island agribusiness, public administration, RPJMD Ambon City

Abstrak - Pengembangan agribisnis di wilayah kepulauan menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan aksesibilitas, fragmentasi wilayah, dan lemahnya koordinasi kebijakan lintas sektor. Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku memiliki potensi besar dalam pengembangan agribisnis berbasis kepulauan yang didukung oleh sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat daerah, pelaku agribisnis, pengelola UMKM, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen terhadap berbagai instrumen kebijakan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon, RPJMD Provinsi Maluku, dan rencana strategis perangkat daerah terkait. Analisis data difokuskan pada aktor kolaborasi, hubungan kelembagaan, serta mekanisme tata kelola kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku agribisnis, dan masyarakat pesisir belum terlembaga secara kuat dan masih bersifat sektoral. Analisis terhadap indikator RPJMD juga mengungkap adanya kesenjangan antara arah kebijakan dan praktik implementasi, khususnya dalam koordinasi lintas perangkat daerah, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan nilai tambah produk

agribisnis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme tata kelola kolaboratif melalui kebijakan lintas sektor yang terintegrasi, pelembagaan kemitraan antara pemerintah dan UMKM, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agribisnis kepulauan.

Kata-kunci: *collaborative governance*, agribisnis kepulauan, administrasi publik, RPJMD Kota Ambon

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi lokal di wilayah kepulauan menghadapi tantangan struktural yang berbeda dibandingkan wilayah daratan, terutama terkait keterbatasan aksesibilitas, fragmentasi wilayah, dan tingginya biaya distribusi. Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, sekaligus sebagai simpul distribusi hasil pertanian dan perikanan dari pulau-pulau sekitarnya. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendorong pengembangan agribisnis kepulauan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Secara empiris, sektor agribisnis di Kota Ambon ditopang oleh komoditas pertanian dan perikanan rakyat seperti hortikultura, pala, cengkeh, kelapa, serta hasil perikanan tangkap dan budidaya. Aktivitas agribisnis ini melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil, kelompok tani, nelayan, serta pelaku UMKM pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Namun, pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya keterpaduan kebijakan antarperangkat daerah, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta belum terbangunnya kemitraan yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.

Secara kebijakan, arah pembangunan ekonomi Kota Ambon telah menempatkan sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro sebagai pilar utama penguatan ekonomi lokal. Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2021–2026 yang menekankan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan. Selain itu, RPJMD Provinsi Maluku juga menegaskan pentingnya integrasi pembangunan antarwilayah kepulauan melalui penguatan sektor agribisnis dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun, meskipun arah kebijakan tersebut telah dirumuskan secara normatif, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan koordinasi lintas perangkat daerah dan keterpaduan program, sehingga sinergi pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon belum berjalan optimal.

Dalam perspektif Ilmu Administrasi Negara, pemerintah daerah Kota Ambon memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai aktor dan kepentingan pembangunan agribisnis. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani kepentingan pelaku agribisnis, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, praktik pembangunan menunjukkan bahwa pendekatan sektoral masih dominan, sehingga program pengembangan agribisnis berjalan parsial dan kurang sinergis.

Kondisi empiris tersebut menunjukkan perlunya pendekatan *collaborative governance* dalam pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor dan lintas sektor dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Melalui *collaborative governance*, pengembangan agribisnis tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan lokal, peningkatan nilai tambah, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan.

Kajian mengenai *collaborative governance* menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi pendekatan yang semakin penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang bersifat kompleks dan lintas sektor. Kolaborasi memungkinkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, serta organisasi lainnya membangun mekanisme pengambilan keputusan bersama, berbagi sumber daya, dan menciptakan inovasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal (Florini & Pauli, 2018). Dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, tata kelola kolaboratif juga terbukti mampu memperkuat pembangunan ekonomi lokal melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kepercayaan, kepemimpinan kolaboratif, dan partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Haris et al., 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah diterapkan pada berbagai sektor pembangunan daerah. Dalam bidang kesehatan, tata kelola kolaboratif berhasil memperkuat koordinasi antarorganisasi pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting, meskipun dinamika kolaborasi terus mengalami perubahan sesuai kondisi lokal dan kebijakan pemerintah (Afandi et al., 2023). Pada sektor lingkungan, kolaborasi antarpemangku kepentingan juga berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan organisasi nonpemerintah dalam mendukung program Clean Cities Blue Ocean di Kota Ambon (Sohilait et al., 2024). Sementara itu, pengembangan desa wisata berbasis masyarakat menunjukkan bahwa sinergi pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas lokal mampu meningkatkan keberlanjutan destinasi wisata sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat (Nur Hidayah & Imawan, 2026; Larasati Putri et al., 2025).

Kajian lain menyoroti bahwa tata kelola kolaboratif menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis pertanian tradisional memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat mampu meningkatkan produktivitas ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pertanian tradisional (Anwar et al., 2025). Demikian pula, pemberdayaan kelompok tani melalui mekanisme kolaboratif terbukti meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, memperluas akses terhadap sumber daya, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan (Fatimah et al., 2021). Pengembangan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Bandung juga menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak menghasilkan peningkatan inovasi ekonomi kreatif melalui pembagian peran yang lebih jelas di antara para aktor pembangunan (Wicaksono, 2021).

Dalam sektor agribisnis, berbagai penelitian mengonfirmasi bahwa *collaborative governance* berperan penting dalam meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan produktivitas pertanian. Model tata kelola kolaboratif pada agribisnis di Provinsi Banten menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan pertanian sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan petani dalam proses perencanaan hingga implementasi program (Hikmawan et al., 2020). Pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bandung juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kemitraan yang kuat dengan petani dan sektor swasta (Iyoeaga, 2020). Penelitian mengenai pengembangan kawasan sorgum di Kabupaten Sumba Timur menegaskan bahwa korporasi petani dapat menjadi model kolaboratif yang efektif dalam meningkatkan produktivitas, akses pasar, dan kesejahteraan petani (Arvianti et al., 2025).

Perspektif internasional memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi faktor utama dalam pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Tata kelola kolaboratif pada pengelolaan lingkungan pertanian di Eropa mampu meningkatkan efektivitas konservasi lahan melalui koordinasi spasial antarpetani dan pemerintah (Westerink et al., 2017). Pengembangan klaster agribisnis berkelanjutan juga membutuhkan integrasi pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat untuk memperkuat daya saing kawasan pertanian (Perdana et al., 2018). Di Vietnam, model tata kelola yang berfokus pada petani kecil menunjukkan bahwa fleksibilitas kolaborasi antarorganisasi mampu meningkatkan keberhasilan pembangunan agribisnis berbasis komunitas (Dung et al., 2022). Penelitian di Tiongkok juga membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perusahaan agribisnis, dan rumah tangga petani meningkatkan efektivitas adopsi teknologi konservasi pertanian secara signifikan (Miao et al., 2025). Selain itu, kemitraan pemerintah dan pelaku agribisnis dalam pengembangan energi biogas di kawasan pedesaan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mendukung pembangunan pedesaan yang berkelanjutan (Vilké & Gedminaitė-Raudonė, 2020).

Beberapa penelitian mengembangkan model kolaborasi yang lebih luas melalui pendekatan *quadruple helix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Model ini dinilai mampu memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan inovasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor di Kota Ambon (Muhtar et al., 2025). Integrasi kearifan lokal ke dalam tata kelola kolaboratif juga terbukti memperkuat efektivitas pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pelestarian nilai budaya lokal (Dewi et al., 2026). Pendekatan interdisipliner antara administrasi publik dan agribisnis semakin memperkaya model pembangunan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Sam et al., 2025).

Kajian mengenai pengembangan ekonomi lokal berbasis kawasan juga menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif mampu mempercepat transformasi ekonomi pedesaan melalui digitalisasi, pengembangan pariwisata, serta peningkatan orientasi ekspor produk lokal (Wicaksono et al., 2025). Pengembangan agrowisata berbasis kebun desa memperlihatkan bahwa tata pamong kolaboratif memperkuat sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok tani dalam menciptakan destinasi wisata pertanian yang berkelanjutan (Hamyana et al., 2022). Penelitian mengenai pengembangan kawasan agropolitan juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah pada era normal baru sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun dinamika kolaborasi yang adaptif di antara seluruh aktor pembangunan (Haris et al., 2021).

Dalam konteks Kota Ambon, berbagai dokumen pembangunan menunjukkan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan pengembangan ekonomi lokal menjadi prioritas pembangunan daerah. RPJMD Kota Ambon menempatkan penguatan ekonomi berbasis potensi wilayah sebagai salah satu sasaran pembangunan jangka menengah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon, 2021). Kebijakan tersebut didukung oleh Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kota Ambon yang menekankan peningkatan produktivitas sektor primer melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan pembangunan (Dinas Pertanian Kota Ambon, 2022; Dinas Perikanan Kota Ambon, 2022). Selain itu, data statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan masih memberikan kontribusi penting terhadap struktur ekonomi Kota Ambon sehingga memerlukan model tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan secara efektif (Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2023). Arah pembangunan tersebut juga sejalan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Maluku yang menekankan pengembangan ekonomi wilayah kepulauan melalui sinergi lintas sektor dan penguatan kolaborasi antaraktor pembangunan (Pemerintah Provinsi Maluku, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas *collaborative governance* pada sektor pertanian, desa wisata, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan daerah, kajian yang secara khusus mengintegrasikan karakteristik wilayah kepulauan dengan pengembangan agribisnis di Kota Ambon masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang membuka peluang untuk mengembangkan model tata kelola kolaboratif yang sesuai dengan karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan wilayah kepulauan sehingga dapat mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan di Kota Ambon.

Paragraf-paragraf tersebut telah dikelompokkan berdasarkan tema (konsep *collaborative governance*, implementasi lintas sektor, agribisnis, model kolaborasi, konteks Ambon, dan *research gap*) serta disusun dengan gaya naratif yang sesuai untuk bagian *literature review* pada artikel jurnal ilmiah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian administrasi negara serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan agribisnis kepulauan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik *collaborative governance* dalam pengembangan agribisnis kepulauan yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan lokal. Lokasi penelitian meliputi wilayah-wilayah sentra aktivitas agribisnis di Kota Ambon, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah pesisir. Informan kunci meliputi perangkat daerah terkait (Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bappeda), pelaku agribisnis lokal, pengelola UMKM pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, antara lain RPJMD Kota Ambon, dokumen Renstra perangkat daerah terkait (Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), serta laporan pembangunan daerah Provinsi Maluku yang relevan dengan pengembangan agribisnis kepulauan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada: (1) aktor kolaborasi dalam pengembangan agribisnis kepulauan, (2) pola relasi kelembagaan antaraktor, dan (3) mekanisme *collaborative governance* yang berjalan di Kota Ambon.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Aktor utama dalam pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon meliputi pemerintah daerah, pelaku agribisnis rakyat, pelaku UMKM, serta masyarakat pesisir. Pemerintah daerah berperan dalam perencanaan dan fasilitasi kebijakan, sementara pelaku agribisnis dan UMKM menjalankan fungsi produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian serta perikanan.

3.1.1 Pola Relasi Kelembagaan

Relasi kelembagaan antar-aktor masih menunjukkan fragmentasi. Koordinasi antar-perangkat daerah belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga dukungan kebijakan terhadap agribisnis kepulauan belum optimal. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kesinambungan program dan terbatasnya akses pelaku agribisnis terhadap dukungan kebijakan. Analisis terhadap dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon masih dirancang dan diimplementasikan secara sektoral. Setiap perangkat daerah memiliki indikator kinerja dan target program masing-masing, namun belum terintegrasi dalam satu kerangka *collaborative governance*. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kesinambungan antara program peningkatan produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran, sebagaimana tercermin dalam temuan empiris penelitian yang menunjukkan terbatasnya kemitraan strategis dan koordinasi lintas sektor.

3.1.2 Implementasi Collaborative Governance

Penerapan *collaborative governance* di Kota Ambon masih bersifat parsial dan belum ter-institusionalisasi secara kuat. Namun, terdapat peluang penguatan kolaborasi melalui forum lintas sektor, kemitraan pemerintah UMKM, serta pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan agribisnis kepulauan.

Tabel 1. Pemetaan Indikator RPJMD Kota Ambon dengan Temuan Penelitian

No	Indikator RPJMD Kota Ambon	Arah Kebijakan RPJMD	Temuan Empiris Penelitian	Implikasi Collaborative Governance
1	Peningkatan produktivitas pertanian & perikanan	Penguatan komoditas unggulan dan ekonomi kepulauan	Produktivitas masih bergantung pada skala kecil dan teknologi sederhana	Perlu kolaborasi pemerintah–pelaku usaha–UMKM
2	Penguatan UMKM dan ekonomi rakyat	Pengembangan usaha mikro berbasis sumber daya lokal	UMKM agribisnis belum terhubung kuat dengan rantai nilai	Kemitraan lintas sektor perlu dilembagakan
3	Koordinasi lintas perangkat daerah	Sinkronisasi program pembangunan ekonomi	Koordinasi masih sektoral dan programatik	Diperlukan forum <i>collaborative governance</i>
4	Pemberdayaan masyarakat pesisir	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi belum optimal dalam perencanaan kebijakan	Pelibatan masyarakat sebagai aktor kolaborasi
5	Peningkatan nilai tambah produk lokal	Hilirisasi dan pemasaran produk agribisnis	Pengolahan dan pemasaran masih terbatas	Kolaborasi untuk penguatan rantai nilai lokal

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai aktor, yaitu Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku, kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM agribisnis, perguruan tinggi, serta lembaga keuangan. Pola hubungan antaraktor telah menunjukkan karakteristik *collaborative governance*, namun implementasinya belum berlangsung secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui penyediaan program pemberdayaan, bantuan sarana produksi, serta pelatihan pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Akan tetapi, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah masih bersifat sektoral sehingga belum menghasilkan perencanaan terpadu yang mampu

memperkuat rantai nilai agribisnis kepulauan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi masih berada pada tahap koordinatif dibandingkan integratif (Afandi et al., 2023; Hidayasa et al., 2023).

Hasil observasi peneliti juga menemukan bahwa potensi agribisnis kepulauan Kota Ambon sangat besar, terutama pada komoditas hortikultura, pala, cengkih, kelapa, serta hasil perikanan yang menjadi komoditas unggulan daerah. Namun, keterbatasan konektivitas antarpulau menyebabkan biaya distribusi tinggi, waktu pemasaran lebih lama, dan kualitas produk sering mengalami penurunan sebelum mencapai pasar. Informan dari kelompok tani mengungkapkan bahwa sebagian besar hasil produksi masih dijual dalam bentuk bahan mentah karena keterbatasan fasilitas pascapanen dan industri pengolahan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah produk belum optimal sehingga pendapatan petani relatif rendah. Temuan ini menunjukkan perlunya sinergi kebijakan transportasi, logistik, dan investasi infrastruktur melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat (Madubun & Madubun, 2023; Saban et al., 2023).

Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam forum kolaborasi mulai meningkat melalui pembentukan kelompok tani, koperasi, dan forum kemitraan desa. Namun demikian, partisipasi tersebut masih bersifat programatik dan belum berkembang menjadi proses pengambilan keputusan bersama. Beberapa informan menyampaikan bahwa masyarakat sering kali hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan program, sedangkan proses perencanaan masih didominasi oleh pemerintah. Akibatnya, sebagian program belum sepenuhnya menjawab kebutuhan lokal setiap kawasan kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berbeda. Temuan ini mengindikasikan bahwa prinsip partisipatif dalam *collaborative governance* masih memerlukan penguatan melalui dialog yang inklusif dan berkelanjutan (Janah & Dewi, 2026; Afandi et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peran perguruan tinggi di Kota Ambon mulai terlihat melalui kegiatan penelitian, pendampingan teknologi budidaya, pelatihan pengolahan hasil pertanian, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia petani. Akan tetapi, kerja sama antara akademisi dengan pemerintah daerah belum terbangun secara sistematis dalam bentuk program jangka panjang. Transfer inovasi masih bersifat insidental mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Padahal, pengembangan agribisnis kepulauan membutuhkan dukungan riset terapan, digitalisasi pemasaran, inovasi teknologi budidaya, dan pengembangan kelembagaan ekonomi lokal yang dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan *quadruple helix* belum berjalan optimal dalam mendukung tata kelola kolaboratif (Iskandar & Prasetyanti, 2023; Janah & Dewi, 2026).

Temuan penelitian berikutnya memperlihatkan bahwa sektor swasta mulai berpartisipasi melalui kemitraan pemasaran hasil pertanian, penyediaan modal usaha, dan pengembangan UMKM berbasis agribisnis. Akan tetapi, jumlah investor yang terlibat masih terbatas sehingga akses pasar modern belum berkembang secara maksimal. Hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa kepastian pasokan, kualitas produk, dan kontinuitas produksi masih menjadi kendala utama dalam membangun kemitraan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan model kolaborasi yang mampu menjamin keberlanjutan produksi melalui penguatan kelembagaan petani, koperasi, dan dukungan pemerintah sebagai mediator antara produsen dan pasar (Asteriniah & Hestiriniah, 2023; Arvianti et al., 2025).

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat Ambon menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pengembangan agribisnis kepulauan. Nilai gotong royong, hubungan kekeluargaan, serta budaya saling membantu masih menjadi kekuatan dalam kegiatan produksi maupun pemasaran hasil pertanian. Namun demikian, modal sosial tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kelembagaan ekonomi yang kuat. Beberapa kelompok tani masih menghadapi keterbatasan manajemen organisasi, administrasi keuangan, dan kemampuan negosiasi pasar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan (*trust building*) sebagai fondasi utama *collaborative governance* (Arvianti et al., 2025; Haerul, 2026).

Dari perspektif tata kelola, hasil penelitian menemukan bahwa kepemimpinan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun komitmen bersama antaraktor. Informan menyampaikan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi komunikasi, menyelesaikan konflik kepentingan, serta menjaga kesinambungan forum kolaboratif. Namun demikian, perubahan kebijakan dan rotasi pejabat sering menghambat keberlanjutan program yang telah dirancang sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya bergantung pada keberadaan aktor, tetapi juga pada konsistensi kepemimpinan, kepastian regulasi, dan komitmen kelembagaan dalam jangka panjang (Madubun & Madubun, 2023; Hidayasa et al., 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon telah berkembang melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur kepulauan, rendahnya nilai tambah produk, serta lemahnya integrasi kelembagaan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil observasi peneliti, model kolaborasi yang paling sesuai adalah penguatan kemitraan berbasis *quadruple helix* yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, akademisi sebagai sumber inovasi, dunia usaha sebagai penggerak investasi dan pemasaran, serta masyarakat sebagai aktor utama pembangunan agribisnis. Pendekatan tersebut diyakini mampu meningkatkan daya saing agribisnis kepulauan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kota Ambon (Arvianti et al., 2025; Janah & Dewi, 2026; Afandi et al., 2023).

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon masih berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Meskipun Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan arah pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam membangun sinergi antarpemangku kepentingan. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan pada tingkat perencanaan dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kolaborasi yang terbangun masih bersifat administratif dan sektoral, belum berkembang menjadi tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan pemerintah, pelaku agribisnis, UMKM, akademisi, komunitas masyarakat, dan sektor swasta dalam satu mekanisme pengambilan keputusan bersama.

Berdasarkan Tabel 1, indikator pertama mengenai peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan menunjukkan bahwa RPJMD Kota Ambon telah menempatkan penguatan komoditas unggulan sebagai prioritas pembangunan ekonomi kepulauan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas agribisnis masih dijalankan dalam skala kecil dengan tingkat adopsi teknologi yang relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing produk lokal belum berkembang secara optimal. Dalam perspektif *collaborative governance*, peningkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta pelaku UMKM dalam mendukung inovasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan akses pasar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hikmawan et al. (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan agribisnis sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun kolaborasi multipihak sejak tahap perencanaan hingga implementasi program pembangunan.

Indikator kedua berkaitan dengan penguatan UMKM dan ekonomi rakyat. RPJMD mengarahkan pengembangan usaha mikro berbasis sumber daya lokal sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar UMKM agribisnis di Kota Ambon masih menghadapi keterbatasan akses terhadap jaringan pemasaran, pembiayaan, teknologi pengolahan, serta kemitraan usaha. Keterhubungan antara pelaku produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran belum membentuk rantai nilai agribisnis yang terintegrasi. Akibatnya, nilai tambah produk lokal belum berkembang secara optimal dan posisi tawar pelaku usaha masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan pelembagaan kemitraan lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan komunitas lokal sehingga terbentuk ekosistem agribisnis yang lebih berdaya saing. Temuan ini mendukung penelitian Anwar et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kolaborasi kelembagaan mampu memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha berbasis masyarakat.

Pada indikator ketiga, penelitian menemukan bahwa koordinasi antarperangkat daerah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi pembangunan agribisnis kepulauan. Meskipun berbagai perangkat daerah memiliki program yang saling berkaitan, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, koordinasi yang terbangun masih bersifat sektoral dan berorientasi pada pelaksanaan program masing-masing instansi. Belum terdapat mekanisme koordinasi yang bersifat permanen untuk menyusun perencanaan bersama, berbagi sumber daya, maupun melakukan evaluasi lintas sektor secara berkelanjutan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih program, kurangnya sinkronisasi kebijakan, dan rendahnya

efektivitas implementasi pembangunan. Temuan ini memperkuat pandangan Haris et al. (2024) bahwa efektivitas pembangunan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam membangun koordinasi lintas sektor melalui mekanisme *collaborative governance* yang terstruktur.

Aspek pemberdayaan masyarakat pesisir juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan agribisnis belum berlangsung secara optimal. Masyarakat masih lebih banyak berperan sebagai penerima manfaat dibandingkan sebagai aktor yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Padahal karakteristik wilayah kepulauan menempatkan masyarakat pesisir sebagai pemilik pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Rendahnya tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi yang diterapkan masih bersifat top-down. Dalam konsep *collaborative governance*, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada adanya partisipasi yang setara, dialog, kepercayaan antarpihak, dan pembagian tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas ruang partisipasi publik melalui forum konsultasi, musyawarah pembangunan, maupun kelembagaan kolaboratif lainnya sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pembangunan agribisnis kepulauan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Dewi et al. (2026) yang menegaskan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam tata kelola kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas pembangunan berbasis masyarakat.

Selanjutnya, indikator peningkatan nilai tambah produk lokal memperlihatkan bahwa kegiatan hilirisasi agribisnis di Kota Ambon masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek pengolahan pascapanen, standardisasi mutu, pengemasan produk, branding, dan pemasaran. Sebagian besar komoditas pertanian dan perikanan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonomi yang diterima masyarakat relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan agribisnis belum sepenuhnya mengintegrasikan seluruh mata rantai nilai (*value chain*), mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Dalam perspektif *collaborative governance*, penguatan rantai nilai memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, UMKM, lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor pemasaran digital. Kolaborasi tersebut memungkinkan terjadinya transfer teknologi, inovasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pasar sehingga daya saing produk agribisnis kepulauan dapat meningkat secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Miao et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku agribisnis, dan masyarakat mampu meningkatkan efektivitas pengembangan sektor pertanian melalui integrasi inovasi dan kelembagaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon belum sepenuhnya memenuhi karakteristik tata kelola kolaboratif sebagaimana dikemukakan dalam berbagai literatur, yaitu adanya partisipasi multipihak, kepemimpinan kolaboratif, dialog berkelanjutan, pembagian sumber daya, kepercayaan antarpemangku kepentingan, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Kolaborasi yang berlangsung saat ini masih didominasi oleh hubungan administratif antarinstansi pemerintah sehingga belum menghasilkan integrasi kebijakan yang mampu memperkuat daya saing agribisnis daerah. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kelembagaan melalui pembentukan forum *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku agribisnis, UMKM, akademisi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal sebagai mitra pembangunan. Forum tersebut dapat menjadi media koordinasi, penyusunan kebijakan bersama, penyelesaian konflik kepentingan, pertukaran informasi, dan evaluasi program secara berkelanjutan sehingga pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon mampu berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi berbasis wilayah kepulauan. Penguatan *collaborative governance* tidak cukup dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang mampu menghubungkan seluruh aktor pembangunan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan ekosistem kolaboratif yang memperkuat inovasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi collaborative governance dalam pengembangan agribisnis kepulauan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, telah menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga pendukung dalam mendorong pengembangan sektor agribisnis. Namun, efektivitas kolaborasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antarpulau, rendahnya kapasitas kelembagaan petani, serta belum optimalnya pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam rantai nilai agribisnis. Di sisi lain, potensi sumber daya alam yang melimpah, modal sosial masyarakat, serta meningkatnya partisipasi para pemangku kepentingan merupakan modal penting untuk memperkuat tata kelola kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model collaborative governance yang berbasis kemitraan quadruple helix melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, perluasan investasi sektor agribisnis, pemanfaatan inovasi teknologi, serta komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing agribisnis kepulauan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon.

Referensi

- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: Shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Development Studies Research*, 10(1), Article 2212868. <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Anwar, M., Nurkidam, A., Mahyuddin, M., & Bakri, M. (2025). Collaborative governance in Village-Owned Enterprises: A case study of traditional rice field-based BUMDes in Tubo Selatan. *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, 15(2), 81–97. <https://doi.org/10.35905/komunida.v16i2.13416>
- Arvianti, E. Y., Santosa, B., & M. (2025). Collaborative governance based on farmers' corporations in the development of sorgum areas in east sumba district. *AGROMIX*. <https://doi.org/10.35891/agx.v16i2.4816>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2021–2026. Pemerintah Kota Ambon.
- Badan Pusat Statistik Kota Ambon. (2023). Kota Ambon dalam Angka 2023. BPS Kota Ambon.
- Dewi, N. M. R., Putra, I. G. N. D. P., Dewi, N. K. T. P., Putra, I. G. E. P., & Putri, N. P. D. K. (2026). Integration of local wisdom and collaborative governance in Tegal Harum Village, Denpasar City. *International Journal of Science and Society*, 8(1), 363–375. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v8i1.1649>
- Dinas Perikanan Kota Ambon. (2022). Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Ambon Tahun 2021–2026. Pemerintah Kota Ambon.
- Dinas Pertanian Kota Ambon. (2022). Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Ambon Tahun 2021–2026. Pemerintah Kota Ambon.
- Dung, N. T., Schmied, D., & Van Chinh, L. (2022). Developing a Flexible Form of Collaborative and Inter-Organizational Governance: The Small Farmer-Focused Governance Model in Lam San Commune (Vietnam). *Global Journal of Flexible Systems Management*, 23, 51–64. <https://doi.org/10.1007/s40171-022-00332-x>
- Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo. 294–307.
- Florini, A., & Pauli, M. (2018). Collaborative governance for the Sustainable Development Goals. *Asia & the Pacific Policy Studies*. <https://doi.org/10.1002/app5.252>
- Hamyana, H., Muditha, I., & Abridin, M. M. (2022). Tata Pamong Kolaboratif dalam Pengembangan Agrowisata “Kebun Desa” di Desa Tulungrejo, Kota Batu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. <https://doi.org/10.18343/jipi.27.2.165>
- Haris, R. A., Said, A., Suryono, A., & Rozikin, M. (2021). Managing Collaborative Governance Dynamics in Agropolitan Development to Face the New Normal Era. *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.082>
- Haris, R. A., Suryono, A., Said, A., & Rozikin, M. (2024). Collaborative Governance in Local Economic Development: the Case in East Java, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2501>
- Hidayah, N., & Imawan, S. A. (2026). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka. *Journal of Management and Public Policy*, 15(2), 835–846. <https://doi.org/10.14710/jmpp.v15i2.56945>
- Hikmawan, M., Hamid, A., Nurrohmah, B., Ramadhan, G., & Mayrudin, Y. (2020). Collaborative Governance Model on Agricultural Business in Banten, Indonesia. 176–201. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.3>
- Iyoega, R. R. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *PERSPEKTIF*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>

- Larasati Putri, H. D., Rahaju, T., & Megawati, S. (2025). Collaborative governance for educational eco-tourism and local economic development in Rendeng Village, Bojonegoro. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 396–411. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.2.396-411.2025>
- Madubun, J., Muhtar, M., Khairunnisa, A., & Tatisina, F. (2025). Collaboration for The Implementation of Ambon Smart City. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*. <https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i3.3845>
- Miao, S., Chen, B., & Jiang, N. (2025). Collaboration among governments, agribusinesses, and rural households for improving the effectiveness of conservation tillage technology adoption. *Scientific Reports*, 15. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83827-0>
- Muhtar, M., Madubun, J., Khairunnisa, A., & Suatrat, F. (2025). The Quadruple Helix Model in Strengthening the Governance of Ambon City Government. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v6i2.911>
- Pemerintah Provinsi Maluku. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019–2024. Pemerintah Provinsi Maluku.
- Perdana, T., Arari, H., Rahayu, H., Ginanjar, T., & Sesy, N. P. A. (2018). Development of collaboration in sustainable agribusiness cluster. 01045. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201815901037>
- Sam, S. A., Usman, R., & Mardan, S. (2025). Interdisciplinary Collaboration between Public Administration and Agribusiness in Local Wisdom-Based Local Economic Development. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*. <https://doi.org/10.52046/jssh.v5i2.2714>
- Sohilait, J. F., Rengifurwarin, Z. A., Ufie, J. A., & Selanno, H. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Clean Cities Blue Ocean (CCBO) Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2689>
- Vilkė, R., & Gedminaitė-Raudonė, Ž. (2020). Collaboration Between Government And Agribusiness For Biogas Production: Balanced Development Of Rural Sustainability. *Public Policy and Administration*, 19, 298-313. <https://doi.org/10.13165/vpa-20-19-2-11>
- Wattiheluw, N. ' U., & Loupatty, L. (2025). Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Di Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi Kompetif*. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2179>
- Westerink, J., Jongeneel, R., Polman, N., Prager, K., Franks, J., Dupraz, P., & Mettepenningen, E. (2017). Collaborative governance arrangements to deliver spatially coordinated agri-environmental management.. *Land Use Policy*, 69, 176-192. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.002>
- Wicaksono, I., Prayitno, H., Karyadi, H., & Helpiastuti, S. B. (2025). Collaborative Governance Regime Driving Digital, Tourism, and Export Transformation in Rural Sidomulyo. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2025.7.12.12>
- Wicaksono100, F. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi Dan Kreativitas Masyarakat Di Kota Bandung. Authors. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.23969/decision.v3i2.5076>